

## **RINGKASAN**

**Fazar Siddik Harahap  
210510241**

**Analisis Yuridis Penyelesaian Pembayaran Utang  
Kepada Kreditur Atas Pailitnya PT.Sri Rejeki  
Isman,Tbk (Sritex)**

**(Arif Rahman, S.H., M.H dan Dr. Nurarafah, S.H.,  
M.H)**

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada krediturnya. Latar belakang penelitian ini adalah kasus PT.Sritex yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya meskipun telah melalui mekanisme PKPU. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan hukum dalam penyelesaian utang setelah PT.Sritex,Tbk dinyatakan pailit serta implikasi yuridis dari putusan pailit tersebut terhadap hak-hak kreditur.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan bersifat deksriptif-analitis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan,doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian utang pada PT.Sritex,Tbk mengikuti mekanisme UUK-PKPU, dimulai dari penetapan tanggal insolvensi, inventarisasi aset oleh kurator, pendaftaran dan pencocokan piutang, hingga penjualan aset melalui lelang untuk kemudian dibagikan kepada kreditur sesuai urutan prioritas. Namun, jumlah aset PT.Sritex,Tbk yang terbatas menimbulkan kondisi insolvensi berat sehingga sebagian kreditur konkuren berpotensi tidak memperoleh pelunasan. Implikasi yuridis dari putusan pailit ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi kreditur, khususnya melalui peran kurator yang wajib melaksanakan pengelolaan aset secara transparan dan akuntabel. Selain itu, putusan pailit juga menimbulkan dampak sosial-ekonomi, terutama terhadap pekerja yang berkedudukan sebagai kreditur preferen. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila aset debitur tidak mencukupi adalah melalui *actio pauliana* atau penunjukan penanggung utang sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara.

Disaran kepada semua yang terlibat dalam kepailitan agar Peningkatan transparansi Proses harus lebih dilakukan dengan transparan, semua pihak yang terlibat dapat memahami langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian utang. Pemberian informasi yang jelas dan tepat waktu untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan terhadap proses hukum.

**Kata Kunci : Kepailitan, Penyelesaian Utang, Kreditur.**

## SUMMARY

**Fazar Siddik Harahap**  
**210510241**

*Juridical Analysis of the Settlement of Debt  
Payments to Creditors for the Bankruptcy of Pt.Sri  
Rejeki Isman, Tbk (Sritex)*

**(Arif Rahman, S.H., M.H and Dr. Nurarafah,  
S.H., M.H)**

*Bankruptcy is a situation in which the debtor is unable to make payments on debts rather than his creditors. The background of this research is the case of PT. Sritex which failed to fulfill its debt payment obligations even though it had gone through the PKPU mechanism. The main problem studied in this study is how the huum stages in debt settlement after PT. Sritex, Tbk was declared bankrupt and the juridical implications of the bankruptcy decision on the rights of creditors.*

*The research method used is normative juridical with a statue approach and is descriptive-analytical. Research data was obtained through literature studies by examining relevant laws and regulations, doctrines, and court decisions.*

*The results of the study show that the settlement of debts at PT. Sritex, Tbk follows the UUK-PKPU mechanism, starting from the determination of the date of insolvency, asset inventory by the curator, registration and matching of receivables, to the sale of assets through auction to then be distributed to creditors in order of priority. However, the number of assets of PT. Sritex, Tbk's limited liability has caused severe insolvency conditions so that some concurrent creditors have the potential to not get repayment. The juridical implications of this bankruptcy ruling affirm the importance of legal protection for creditors, especially through the role of curators who are obliged to carry out transparent and accountable asset management. In addition, the bankruptcy decision also has a socio-economic impact, especially on workers who are positioned as preferred creditors. Legal remedies that can be taken if the debtor's assets are insufficient is through actio pauliana or the appointment of a debt insurer in accordance with the provisions of the Civil Code.*

*It is suggested to all those involved in bankruptcy that the Increased transparency of the process must be carried out more transparently, all parties involved can understand the steps taken in debt settlement. Providing clear and timely information to reduce uncertainty and increase confidence in the legal process.*

**Keywords:** *Bankruptcy, Debt Settlement, Creditors.*